

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan pra-sekolah (PAUD) merupakan hal yang penting bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter yang dimiliki anak sejak dini. PAUD mempersiapkan anak untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan anak usia dini merupakan tahap perkembangan yang paling penting dalam masa hidup manusia. Program-program perlindungan, pengasuhan anak dan pendidikan usia dini yang berkualitas menghasilkan manfaat dan efek jangka panjang yang lebih dari pada program belajar semata. Hasil pemantauan menunjukkan masih banyak anak-anak yang kurang beruntung untuk memperoleh manfaat program PAUD. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini, maju dan berkembangnya pembangunan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerusnya. Penyiapan generasi unggul untuk menjawab kemajuan peradaban harus disiapkan sejak dini. PAUD merupakan pendidikan yang paling mendasar. PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2016 berupaya membantu penyediaan BOP PAUD melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp

4,47 triliun untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tahun 2019 jumlah tersebut naik 10 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Dana tersebut diberikan kepada 7.459.167 anak dengan nominal sebesar Rp 600.000 untuk masing-masing peserta didik per tahun. Besaran dana BOP yang diterima di tiap sekolah berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Syaratnya adalah anak didik sudah terdaftar dalam Data Pokok PAUD dan Pendidikan Masyarakat (DAPODIK). Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening satuan PAUD dilakukan 2 kali tahapan dalam 1 tahun.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktik laporan pertanggungjawaban dalam Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dengan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa yaitu prinsipal memberikan wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan berfokus pada dua orang yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pihak lain yang disebut agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Agen sebagai pihak pemberi amanah untuk menjalankan dana dari pihak pemberi (prinsipal) dan agen harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dimanahkan. Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban dan memonitoring jalannya dana yang dikelola oleh agen tersebut (Faristina, 2011).

Selain *agenny theory*, teori lain yang mendasari penelitian ini ialah teori Stakeholder. Istilah Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (RSI) pada tahun 1963. Syukron, 2015 mendefinisakan bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan (Ardian dan Rahardja, 2013). Dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan teori Stakeholder masyarakat sebagai pengguna jasa publik merupakan stakeholder utama dalam organisasi sektor publik, oleh karena itu suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan berhasil apabila kepuasan masyarakat dapat terjamin. Sedangkan pemerintah harus menjamin informasi dalam kualitas laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh pengelola dana BOP bermanfaat bagi stakeholder.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang menyatakan bahwa ada beberapa lembaga Taman Kanak- Kanak (TK) yang menolak dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, berikut ini adalah data terkait lembaga yang menolak dana BOP pada tahun 2020.

Tabel 1.1  
Lembaga yang menolak dana BOP  
2020

NO	Nama Lembaga	Kecamatan
1	TK Window to the word	Buleleng
2	TK Aura Sukma Insani	Sukasada
3	TK Widya Kumara	Tejakula
4	TK Tunas harapan	Gerokgak

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng)

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada saat observasi awal, ada beberapa lembaga yang masih melakukan kesalahan dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP. Beberapa lembaga bahkan menolak dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan alasan tidak mempunyai Tata Usaha (TU) yang bisa membantu. Pada tahun 2016 pemerintah mencairkan dana BOP sekali dalam satu tahun. Akan tetapi, mulai tahun 2019 pemerintah mengeluarkan peraturan baru. BOP akan dicairkan melalui dua tahap dalam satu tahun, sehingga secara langsung lembaga harus mengurus program BOP secara dua tahap mulai dari menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD hingga pelaporan pertanggungjawaban. Dengan adanya hal ini, jangka waktu penyelesaian laporan pertanggungjawaban BOP akan semakin sedikit sehingga kualitas laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan belum optimal dan ada yang belum sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOP. Sehingga lembaga merasa kurang mampu dalam mengurus program BOP sehingga ada beberapa lembaga yang menolak untuk diberikan dana BOP tersebut. Jika lembaga menolak untuk diberikan dana BOP, maka akan berdampak

pada proses operasional belajar mengajar siswa. Siswa akan kekurangan fasilitas dalam proses operasional sekolah karena tidak ada sumber dana masuk. Tidak ada dana yang bisa digunakan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di luar sekolah seperti mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Lembaga tersebut akan menaikkan iuran SPP siswa agar dapat memenuhi kegiatan operasional siswa. Hal ini akan mengakibatkan kurang optimalnya program pemerintah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peningkatan akses dan kualitas PAUD secara Holistik dan Integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

Dalam pemaparan di atas terdapat perbedaan atau kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Teori Keagenan menjelaskan dua orang individu sebagai pelaku utama yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal didefinisikan sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pihak lain yang disebut agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Agen sebagai pihak pemegang amanah harus menjalankan dan mengelola dana dari pihak pemberi (prinsipal). Pemerintah yang memberikan dana BOP (prinsipal). Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) bertindak sebagai agen. Namun, kenyataan di lapangan ada beberapa lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) yang menolak untuk diberikan amanah atau mandat oleh pemerintah untuk mengelola dana Bantuan Operasional penyelenggaraan (BOP). Dalam Teori Keagenan, pihak pemegang amanah (agen) harus memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab atas dana yang sudah dikelola kepada pihak pemberi amanah (prinsipal). Sedangkan, pada kenyataannya masih ada lembaga yang belum sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOP

dalam menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan terkait dana BOP. Teori Keagenan dilandasi oleh asumsi tentang sifat manusia. Asumsi ini menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Asumsi pertama yaitu manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Karena peraturan pemerintah terus berubah-ubah sehingga hal inilah yang membuat lembaga merasa malas untuk mengamprah dana BOP. Tetapi disisi lain masyarakat sangat membutuhkan dana BOP ini. Karena dana ini nantinya dapat meringankan beban orang tua peserta didik dalam mengikutsertakan anaknya dalam program PAUD. Asumsi kedua yaitu memiliki keterbatasan rasionalitas. Masih banyak lembaga yang memiliki keterbatasan rasionalitas. Lembaga belum mampu untuk membuat keputusan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) untuk kepentingan pemerintah (prinsipal). Asumsi ketiga yaitu tidak menyukai resiko. Dalam mengelola dana BOP, lembaga harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan yang nantinya akan di audit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika ada penyelewengan dana maka lembaga yang bersangkutan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perilakunya tersebut. Teori yang kedua yaitu jika dikaitkan dengan teori stakeholder dalam teori ini pemerintah atau pemberi dana BOP harus menjamin laporan pertanggungjawaban bermanfaat bagi stakeholder. Tetapi pemerintah belum bisa secara optimal menjamin bahwa laporan pertanggungjawaban bisa di pahami atau bermanfaat karena dalam laporan pertanggungjawab yang dihasilkan masih terjadi kesalahan

atau belum sesuai dengan peraturan pemerintah tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOP.

Pemerintah sangat mengharapkan kesediaan lembaga untuk mengelola dana BOP yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan layanan pendidikan PAUD yang bermutu. Pendidikan PAUD mempunyai dampak yang luar biasa terhadap manusia di masa depan. PAUD merupakan tempat pendidikan karakter dan kemampuan kognitif. Pendidikan dimulai dari menanamkan moral, kejujuran, sikap menghormati, mulai bergaul dengan teman dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah mulai meyakini dan ikut berkontribusi untuk mensejahterkan PAUD dengan cara memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke setiap lembaga Taman Kanak-kanak (TK) di seluruh Indonesia agar sarana dan prasarana dapat terpenuhi dengan baik. Peserta didik diharapkan dapat belajar sambil bermain dengan nyaman. Lain halnya dengan TK Negeri. Walaupun sama-sama mendapatkan bantuan dana dari pemerintah tetapi TK Negeri tidak melakukan proses administrasi seperti membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Hal ini dikarenakan dana yang diberikan sudah dikelola oleh pemerintah itu sendiri dan pemerintah juga yang membantu dari proses administrasi hingga pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). TK Negeri hanya menerima barang-barang yang dianggarkan yang menjadi kebutuhan masing-masing lembaga tersebut.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan pertanggungjawaban adalah kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan tersebut, peneliti mendapatkan informasi

mengenai ada beberapa lembaga yang menolak diberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah yang berubah secara terus-menerus sehingga beberapa lembaga masih membuat kesalahan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan belum sesuai Petunjuk Teknis penggunaan dana BOP. Faktor pendidikan tenaga pengajar (Guru) seperti ini juga berpengaruh dalam kasus seperti ini. Pendidikan Guru setingkat SMA seperti ini juga berpengaruh terhadap kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing guru untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP. Hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan seseorang yang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya. Selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Laporan keuangan dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mahmudi, 2016). Dengan kompetensi yang dimiliki, masing-masing pegawai bersangkutan semakin mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban dalam mengelola Bantuan Operasional penyelenggaraan (BOP). Menurut Ihsanti (2014), kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini,



adanya kompetensi sumber daya manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014). Menurut Wibowo (2014) Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan/melakukan suatu pekerjaan/ tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu. Kompetensi yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggungjawab mereka secara efektif dan meningkatkan kualitas profesional dalam pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Loksyana (2019) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan penelitian yang dilakukan Desiana (2014) juga mengatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing lembaga maka semakin berkualitas laporan pertanggungjawaban yang akan dihasilkan. Tetapi lain hal dengan penelitian Ihsan Amrullah (2019) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memengaruhi kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan. Inkonsistensi hasil penelitian tentang kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban menjadi dasar peneliti ingin meneliti kembali kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban.

Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Bali yang melaksanakan

seluruh pelayanan pada tingkat Pendidikan. Sebelum menyusun amarah BOP, seluruh Lembaga Taman Kanak- Kanak (TK) diharapkan menginput atau memvalidkan seluruh data siswanya di dalam Data Pokok Satuan PAUD Pendidikan dan Masyarakat (DAPODIK). Penginputan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi computer. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan masing-masing lembaga sebelum menyusun amarah BOP.

Berikut merupakan data terkait dengan lembaga yang belum melakukan sinkronisasi atau validasi data siswanya pada tahun 2020. Yaitu terdiri dari kecamatan, Seririt 2 Lembaga, Banjar 3 Lembaga, Buleleng 1 Lembaga, Sukasada 5 Lembaga dan Kubutambahan 2 Lembaga. Berdasarkan data observasi awal peneliti di Disdikpora tanggal 11 Maret 2020, ada kasus yang menyatakan bahwa ada beberapa lembaga yang terlambat dalam melakukan sinkronisasi data siswa di Data Pokok Satuan PAUD Pendidikan dan Masyarakat (DAPODIK) dengan menggunakan aplikasi di komputer. Jika dengan batas waktu yang telah ditentukan lembaga masih belum mensinkronkan data siswanya, maka lembaga tersebut terancam tidak mendapatkan dana BOP. Selain itu, guru senior juga sebagian besar tidak bisa mengoperasikan teknologi informasi. Hal ini nantinya akan berdampak pada penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini ada berapa lembaga yang belum memahami atau memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer. Pemanfaatan teknologi sangat penting dilakukan agar dapat membantu dalam kecepatan pemrosesan dan penyiapan laporan sehingga tercapainya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan harapan pemerintah. Penguasaan teknologi informasi kini menjadi bagian dari tuntutan kompetensi guru. Hal ini mendukung pelaksanaan tugasnya antara lain dalam membuat

pertanggungjawaban bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu pihak guru berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola informasi keuangan untuk masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Teknologi informasi secara umum telah banyak diketahui manfaatnya antara lain kecepatan pemrosesan, penyiapan laporan, keakuratan perhitungan dan penyimpanan data dengan jumlah yang besar. Menurut Bugishp (2010) informasi merupakan sebuah pengolahan data berupa informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau alat elektronik lain yang berfungsi memproses termasuk menyimpan dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menyiapkan, menyajikan dan melaporkan suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan BOP setiap masing-masing lembaga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Loksaya (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Amrullah (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting diterapkan atau dilakukan demi terwujudnya kualitas laporan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, nantinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh pemangku kepentingan. Tetapi lain halnya dengan Riedy Riandani (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan Inkonsistensi. Hasil penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menjadi dasar peneliti ingin meneliti kembali pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan pertanggungjawaban sangat dipengaruhi oleh cara pemimpinya dalam mengelola suatu dana yang diberikan. Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting agar dana BOP mampu terserap dengan baik. Suatu organisasi jika menerapkan pengendalian internal yang buruk maka akan berdampak pada kegagalan bahkan terjadinya kecurangan. Dikutip dari situs berita online (Kendari,2019), telah terjadi kasus penyelewengan dana BOP PAUD di Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan karena belum diterapkannya pengendalian internal secara optimal. Pengendalian internal berberfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan laporan pertanggungjawaban. Dalam mengelola Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah tentunya membutuhkan pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal hal yang penting bagi suatu organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas, kegiatan maupun prosedur dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan kualitas laporan pertanggungjawaban, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui tujuan dari implementasi pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah menerapkan pelaporan yang andal, organisasi melaksanakan pelaporan keuangan yang andal, organisasi

melaksanakan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan efektif dan efisien serta organisasi mematuhi hukum maupun peraturan-peraturan yang berlaku ketika melakukan tugasnya. Jadi, di dalam mengelola bantuan dana tersebut dibutuhkan pengendalian internal yang baik. Dengan begitu dana yang dianggarkan dapat terealisasi dengan baik dan tepat pada sasaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakriaty (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hutomo (2015) juga mengatakan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan. Tetapi berbeda dengan penelitian Herawati (2014) menyatakan bahwa aktivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga inkonsistensi hasil penelitian tentang sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan menjadi dasar peneliti ingin meneliti kembali pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu yang pertama tempat penelitian. Penelitian terdahulu cenderung meneliti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD), sedangkan pada penelitian ini meneliti Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di Taman Kanak-Kanak (TK). Dana BOP ini mulai diberikan pemerintah pada tahun 2016 sehingga masih sedikit atau jarang diteliti. Di Kabupaten Buleleng sebelumnya juga belum pernah diadakan penelitian tentang hal ini. Perbedaan yang kedua dapat dilihat dari masalah penelitian. Penelitian terdahulu mengangkat permasalahan tentang penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah sedangkan pada penelitian ini mengangkat permasalahan tentang lembaga yang

masih terdapat kesalahan atau belum sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) penggunaan dana BOP dan lembaga yang menolak diberikan dana BOP oleh pemerintah karena peraturan pemerintah yang terus berubah-ubah. Perbedaan selanjutnya yaitu tentang variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini tidak sepenuhnya sama. Variabel yang digunakan dapat disesuaikan dengan masalah penelitian yang diangkat dan keadaan lapangan pada masing-masing penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena/kasus yang muncul dan masih adanya *research* GAP dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pada TK Swasta Di Kabupaten Buleleng**”

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Di dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ada beberapa lembaga dalam melaporkan pertanggungjawaban masih terjadi kesalahan atau belum sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) penggunaan dana BOP. Ada 4 Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu TK Window To The Word, TK Aura Sukma Insani, TK Widya Kumara dan TK Tunas Harapan menolak untuk diberikan dana BOP oleh

pemerintah. Hal ini disebabkan lembaga belum sepenuhnya bisa menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban, sehingga dapat mengakibatkan kurang optimalnya program pemerintah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program RPJMN menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara Holistik dan Integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.

1.2.2 Ada beberapa lembaga yang terancam tidak mendapatkan dana BOP karena belum melengkapi dan mengurus Program BOP.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas maka pembatasan masalah pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pembatasan masalah ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Ketiga variabel tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa permasalahan tersebut yang dapat menentukan Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

### **1.4 Rumusan Masalah**

1.4.1 Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BOP ?

1.4.2 Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BOP ?

1.4.3 Apakah Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BOP ?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BOP.

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BOP.

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BOP.

## **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang bermanfaat dan memberikan literatur tambahan yang membantu dalam bidang akuntansi khususnya mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengendalian internal Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Mahasiswa**



Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan serta memadukan teori yang telah didapat dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mahasiswa tentang Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

## **2. Bagi Taman Kanak-Kanak (TK)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang ada dalam meningkatkan Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) agar program pemerintah dapat berjalan secara maksimal.

## **3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat pertimbangan dalam membuat kebijakan bagi pemerintah untuk seluruh lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) agar lembaga tidak terlalu kesusahan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Peraturan pemerintah diharapkan tidak terus berubah-ubah dalam pengelolaan dana BOP.